

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

TNI Dilibatkan dalam Pengelolaan Sungai di Jabodetabek

Proyek penanganan banjir dilanjutkan setelah polemik program normalisasi dan naturalisasi berakhir.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kodam Jaya Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan program pemeliharaan enam sungai dan lima situ di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Menurut Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, banjir di Jabotabek tak bisa ditangani hanya dengan pembangunan fisik melalui naturalisasi dan normalisasi.

Basoeki menilai keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir sangat penting. Karena itu, pemerintah harus menggerakkan kegiatan non-struktural agar masyarakat berperan aktif. "Ini untuk memaksimalkan fungsi sungai dan situ sebagai pengendali banjir dan tampungan air," kata dia, pekan lalu.

Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan enam sungai yang menjadi fokus kerja sama dengan Kodam Jaya

adalah Sungai Ciliwung, Mookervart, Pesanggrahan, Bekasi, Blencong, dan Sungai Cikeas. Sedangkan untuk situ ialah Situ Sidomukti, Rawa Lumbu, Pasir Gadung, Parigi dan Situ Leungisir.

Menurut Bambang, semua sungai dan situ tersebut telah mengalami pendangkalan akibat penumpukan sampah. Sebagian besar sampah berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi itu diperparah oleh berdirinya bangunan di bantaran sungai atau situ. Dia berharap pelibatan TNI dalam pengelolaan dapat memulihkan fungsi sungai dan situ.

Untuk pembangunan fisik, kata Bambang, Kementerian PUPR telah memasukkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek yang dimulai pada 2013 ini sempat terhenti pada 2017, setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta sempat berpolemik soal cara menata 13 sungai yang mengalir di Ibu Kota sebagai langkah penanganan

banjir. Kementerian PUPR berniat terus melanjutkan program normalisasi dengan membangun dinding beton di sepanjang badan sungai. Sedangkan Anies mengusung program naturalisasi dengan membangun dinding sungai menggunakan batu kali dan pohon.

Bersamaan dengan munculnya polemik itu, pemerintah Jakarta menghentikan pembebasan lahan bantaran sungai sepanjang 17,5 kilometer. Karena itu, Kementerian PUPR tak lagi mengajukan anggaran normalisasi untuk APBN 2019.

Menurut Bambang, sekarang pemerintah Jakarta dan pusat telah sepakat melanjutkan proyek penanganan banjir. Program naturalisasi dan normalisasi akan dikombinasikan untuk memulihkan sungai-sungai di Ibu Kota. "Proyek normalisasi sepanjang 1,5 kilometer di Kelurahan Pejaten Timur anggarannya Rp 26 miliar, akan terealisasi tahun 2020," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan lembaganya tengah menyelesaikan pembebasan lahan

118 bidang tanah di empat kelurahan sebelum akhir 2019. Program penanganan banjir di Sungai Ciliwung sudah bisa dilanjutkan se usai pembayaran ganti rugi kepada para pemilik bidang tanah yang sah. "Oktober mungkin sudah mulai pembebasan lahan," ucapnya.

Panglima Daerah Militer Jaya, Mayor Jenderal Eko Margiyono, mengatakan TNI siap membantu kegiatan pemeliharaan sungai dan situ di Jabotabek. Karena itu, TNI berencana merangkul lembaga swadaya masyarakat dan komunitas pencinta lingkungan hidup untuk turut ambil bagian.

Selain itu, menurut dia, TNI akan membantu Kementerian PUPR dalam pengerjaan penggalian sedimen di dasar sungai dan situ. Penggalian sedimen dengan alat ekskavator yang dimulai 12 September lalu itu diprediksi rampung dalam 90 hari. "Selain melakukan perbaikan kualitas (penggalian sedimen), kami akan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke situ dan sungai," tuturnya.

● IMAM HAMDI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

TNI Dilibatkan dalam Pengelolaan Sungai di Jabodetabek

Memulihkan Sungai

PEMERINTAH Jakarta dan pusat akan melanjutkan program penanganan banjir dengan memulihkan sungai yang melintasi Ibu Kota. Salah satunya adalah program normalisasi dan naturalisasi di Sungai Ciliwung. Targetnya, badan Sungai Ciliwung akan kembali memiliki lebar 40-60 meter dari kondisi saat ini yang hanya 12-15 meter.

Penanganan Banjir di Sungai Ciliwung-Cisadane

- » Panjang: 33,5 kilometer
- » Selesai: 16 kilometer
- » Kelurahan Gedong: 23 bidang tanah seluas 1,6 hektare
- » Kelurahan Balekambang: 45 bidang tanah seluas 3,7 hektare
- » Kelurahan Cililitan: 14 bidang tanah seluas 4,7 ribu meter persegi
- » Kelurahan Cawang: 15 bidang tanah seluas 4,8 ribu meter persegi
- » Kelurahan Kampung Melayu: 10 bidang tanah seluas 1,3 ribu meter persegi
- » Kelurahan Tanjung Barat: 11 bidang tanah seluas 3,8 ribu meter persegi
- » Kelurahan Pejaten Timur: 152 bidang tanah seluas 7,1 hektare
- » Kelurahan Bukit Duri: satu bidang tanah seluas 75 meter persegi
- » Belum selesai: 17,5 kilometer

TEMPO/GUNAWAN WICAKSONO



Pembuatan turap pada proyek normalisasi Kali Grogol di kawasan Palmerah, Jakarta, November 2018.

Pembiayaan

■ Pemerintah DKI Jakarta

APBD 2019: Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di Kelurahan Pejaten Timur, Cililitan, Tanjung Barat, dan Balekambang

■ Rencana APBD 2020: Rp 600 miliar

Biaya pembebasan lahan lanjutan di Sungai Ciliwung
Biaya pembebasan lahan di tepi Sungai Pesanggrahan
Biaya pembebasan lahan di beberapa waduk

■ Pemerintah Pusat

Rencana APBN 2020: Rp 26 miliar
Biaya normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur